

# **KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

Wira Widiya Rini<sup>1</sup> , Susi Astuti<sup>2</sup>

Akuntansi D3, Universitas Putra Bangsa

Email : wirawidiyarini@gmail.com<sup>1</sup> , susie.astutie@gmail.com<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2019. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode dokumentasi. Dimana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yang menggunakan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 samapi dengan tahun 2017 berada dalam kategori sangat berkontribusi, dengan rata-rata prosentase 7,96%. Peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak daerah yang menyumbang realisasi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatn Asli Daerah.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine how the contribution of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) to Regional Original Income (PAD) in all Regencies/Cities of Central Java Province in 2017-2019. This research is a research that uses documentation method. Where this research is a quantitative research with descriptive analysis technique that uses the contribution ratio. The results of the study show that the contribution level of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) to Regional Original Income (PAD) of Central Java Province from 2017 to 2017 is in the category of highly contributing, with an average percentage of 7,96%. The role of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB P2) is a regional tax that contributes greatly to the realization of Regional Original Income (PAD).*

*Keywords: Contribution, Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Original Income.*

# KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019

## PENDAHULUAN

Pajak diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara yang memiliki kontribusi pada pendapatan nasional. Dalam pelaksanaannya beberapa pajak mulai beralih yang awalnya keseluruhan masuk pusat, mulai ada beberapa pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah melalui otonomi daerah.

Melalui otonomi daerah pajak beralih dari pusat ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemerintah harus meningkatkan beberapa pendapatan asli daerah, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada duabelas jenis pajak yang menjadi pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dengan adanya undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 menjadi salah satu pajak yang dikelola pemerintah daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah setiap tahun memiliki target untuk penerimaan Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), namun terkadang realisasinya tidak mencapai target. Realisasi yang tidak mencapai target bisa terjadi karena kurang mengembangkan potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan strategi-strategi tertentu untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) guna ikut serta berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PBB P2 merupakan jenis pajak yang realisasinya sebagian besar melampaui target dan menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar untuk Pajak Daerah yang akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih

kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya. Selain itu juga adanya persaingan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya yaitu pajak-pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Terdapat beragam wilayah geografis di Jawa Tengah, persebaran penduduknya pun beragam dari daerah pegunungan hingga pantai. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah berbeda-beda. Pemungutan pajak kesetiap wajib pajak pun berbeda. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di perdesaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk secara resmi oleh kantor desa atau kelurahan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota lebih cenderung individu. Wajib Pajak datang ke kantor pajak untuk membayar pajak. Hal ini juga didukung dengan fasilitas dan akses publik yang lebih memadai. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro yang sudah tertera pada SPPT. Namun, semakin majunya zaman pembayaran bisa juga diakses melalui online, seperti menggunakan *ATM*, *SMS Banking*, dan *Internet Banking*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019”**.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2019?
4. Bagaimana perbandingan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, 2018, dan 2019?

# KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi diatas pajak adalah iuran rakyat atau wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2013: 101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

### Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

### Kontribusi

Menurut Yandianto dalam Wardani (2017: 11) kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumangan yang diberikan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## METODE

### Objek Penelitian

Penelitian ini menghitung kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakuakn untuk menggambarkan data, baik dalam bentuk tabel maupun grafik, mencari rata-rata (mean), nilai tengah (median), standar deviasi, dan lainnya. Statistik yang digunakan dalam penelitian

deskriptif adalah statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan fitur dasar dari data dalam penelitian. Teknik ini menyediakan ringkasan sederhana tentang semple berupa tabel maupun grafis sederhana, dan membentuk dasar pada hampir setiap analisis data kuantitatif.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019, serta Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019, serta Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia Kementerian Keuangan.

### Analisis Data

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio dapat dinilai dibawah ini:

Tabel I Interpretasi Kriteria Kontribusi	
Prsentase	Kriteria
0%-0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1%-1,9%	Kurang memiliki konteribusi
2%-2,9%	Cukup memiliki konteribusi
3%-3,9%	Memiliki konteribusi
Lebih dari 4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Harumdani (2012: 23)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel II  
Kontribusi PBB P2 pada PAD tahun 2017  
KONTRIBUSI PBB P2 PADA PAD  
TAHUN 2017  
(dalam jutaan)**

Kabupaten	Kontribusi	Keterangan
Banjarnegara	6,4%	Sangat Berkontribusi
Banyumas	8,0%	Sangat Berkontribusi
Batang	9,4%	Sangat Berkontribusi
Blora	6,2%	Sangat Berkontribusi

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

Boyolali	7,4%	Sangat Berkontribusi
Brebes	5,2%	Sangat Berkontribusi
Cilacap	8,3%	Sangat Berkontribusi
Demak	15,7%	Sangat Berkontribusi
Grobogan	5,9%	Sangat Berkontribusi
Jepara	6,7%	Sangat Berkontribusi
Karanganyar	6,2%	Sangat Berkontribusi
Kebumen	7,7%	Sangat Berkontribusi
Kendal	4,4%	Sangat Berkontribusi
Klaten	6,9%	Sangat Berkontribusi
Kudus	5,5%	Sangat Berkontribusi
Magelang	6,4%	Sangat Berkontribusi
Pati	4,4%	Sangat Berkontribusi
Pekalongan	3,9%	Sangat Berkontribusi
Pemalang	3,3%	Sangat Berkontribusi
Purbalingga	5,0%	Sangat Berkontribusi
Purworejo	7,5%	Sangat Berkontribusi
Rembang	3,7%	Sangat Berkontribusi
Semarang	9,9%	Sangat Berkontribusi
Sragen	4,6%	Sangat Berkontribusi
Sukoharjo	7,8%	Sangat Berkontribusi
Tegal	6,8%	Sangat Berkontribusi
Temanggung	4,2%	Sangat Berkontribusi
Wonogiri	4,3%	Sangat Berkontribusi
Wonosobo	8,1%	Sangat Berkontribusi
<b>Kota</b>		
Magelang	2,7%	Cukup Berkontribusi
Pekalongan	6,2%	Sangat Berkontribusi
Salatiga	3,5%	Sangat Berkontribusi
Semarang	19,4%	Sangat Berkontribusi

Surakarta	11,3%	Sangat Berkontribusi
Tegal	4,3%	Sangat Berkontribusi

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebagian besar memiliki prosentase kontribusi lebih dari empat persen atau sangat berkontribusi. Kontribusi tertinggi terdapat pada Kota Semarang dengan besaran 19,4%, kemudian ada Kabupaten Demak dengan 15,7%, dan Kota Surakarta 11,3%. Adapun daerah Kabupaten/ Kota dengan kriteria berkontribusi dengan prosentase 3-3,9% yaitu Kabupaten Pekalongan sebesar 3,9%, Kabupaten Pemalang dengan prosentase 3,3%, Kabupaten Rembang dengan 3,7%, dan Kota Salatiga dengan prosentase 3,5%. Adapula Kabupaten/ Kota dengan kriteria cukup berkontribusi dengan prosentase 2-2,9% yaitu Kota Magelang dengan prosentase 2,7%.

Kota Semarang menjadi Kabupaten/ Kota dengan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tertinggi Jawa Tengah. Hal ini dapat terjadi karena Kota Semarang merupakan Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dengan jumlah industri besar dan menengah terbanyak yaitu 650 perusahaan dengan nilai produksi mencapai Rp. 78.157.304.196,00. Selain itu, menurut presentase rumah tangga dengan luas lantai bangunan per meter persegi Kota Semarang memiliki prosentasi 8,67% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 5,36% untuk luas bangunan 21-35 m<sup>2</sup>; 4,37% untuk luas bangunan 36-44 m<sup>2</sup>; 5,17% untuk luas bangunan 45-54 m<sup>2</sup>; dan 76,47% untuk luas bangunan >54 m<sup>2</sup>. Sedangkan dari jumlah perkebunan pada tahun Kota Semarang memiliki luas 144.740 Ha.

Kontribusi terendah pada tahun 2017 terdapat pada Kota Magelang dengan prosentase 2,7%. Kota Magelang merupakan Kabupaten/ Kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 16,06 Km<sup>2</sup>. Kota Magelang memiliki 29 perusahaan besar dan menengah dengan nilai produksi Rp. 916.541.121,00. Prosentase rumah tangga dengan luas lantai Kota Magelang adalah 4,53% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 14,60% untuk luas 21-35 m<sup>2</sup>; 8,67% untuk luas 36-44 m<sup>2</sup>; 5,46% untuk luas 45-54 m<sup>2</sup>; dan 66,74% untuk luas >54 m<sup>2</sup>. Jumlah luas perkebunan pada Kota Magelang adalah 17.971 Ha.

**Tabel III**  
**Kontribusi PBB P2 pada PAD tahun 2018**  
**KONTRIBUSI PBB P2 PADA PAD**  
**TAHUN 2018**  
**(dalam jutaan)**

Kabupaten	Kontribusi	Keterangan
Banjarnegara	9,5%	Sangat Berkontribusi
Banyumas	7,9%	Sangat Berkontribusi
Batang	8,9%	Sangat Berkontribusi
Blora	8,5%	Sangat Berkontribusi

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

		Berkontribusi
Boyolali	11,7%	Sangat Berkontribusi
Brebes	9,4%	Sangat Berkontribusi
Cilacap	11,2%	Sangat Berkontribusi
Demak	15,6%	Sangat Berkontribusi
Grobogan	8,2%	Sangat Berkontribusi
Jejara	6,4%	Sangat Berkontribusi
Karanganyar	7,4%	Sangat Berkontribusi
Kebumen	12,0%	Sangat Berkontribusi
Kendal	6,3%	Sangat Berkontribusi
Klaten	6,8%	Sangat Berkontribusi
Kudus	7,1%	Sangat Berkontribusi
Magelang	7,9%	Sangat Berkontribusi
Pati	5,3%	Sangat Berkontribusi
Pekalongan	4,8%	Sangat Berkontribusi
Pemalang	5,5%	Sangat Berkontribusi
Purbalingga	6,7%	Sangat Berkontribusi
Purworejo	9,3%	Sangat Berkontribusi
Rembang	5,0%	Sangat Berkontribusi
Semarang	11,6%	Sangat Berkontribusi
Sragen	5,8%	Sangat Berkontribusi
Sukoharjo	8,3%	Sangat Berkontribusi
Tegal	6,8%	Sangat Berkontribusi
Temanggung	5,3%	Sangat Berkontribusi
Wonogiri	8,0%	Sangat Berkontribusi
Wonosobo	8,2%	Sangat Berkontribusi
<b>Kota</b>		
Magelang	2,5%	Cukup Berkontribusi
Pekalongan	7,2%	Sangat Berkontribusi

Salatiga	4,1%	Sangat Berkontribusi
Semarang	22,6%	Sangat Berkontribusi
Surakarta	15,5%	Sangat Berkontribusi
Tegal	4,8%	Sangat Berkontribusi

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)

Pada tahun 2018 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir seluruhnya memiliki kriteria sangat berkontribusi atau memiliki prosentase empat persen atau lebih. Hanya satu daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria cukup berkontribusi dengan prosentase 2,5% yaitu Kota Magelang. Prosentase kontribusi tertinggi masih dimiliki oleh Kota Semarang dengan prosentase 22,6%, kemudian ada Kabupaten Demak dengan prosentase 15,6%, dan diikuti Kota Surakarta dengan prosentase 15,5% selisih 0,1% dari Kabupaten Demak.

Pada tahun 2018 Kota Semarang masih menjadi yang paling tinggi dengan prosentase 22,6%. Masih sama seperti tahun 2017, industri di Kota Semarang masih menjadi yang paling unggul di Jawa Tengah. Dalam prosentase rumah tangga dalam luas lantai Kota Semarang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 Kota Semarang memiliki 9,55% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 6,99% untuk luas 21-35 m<sup>2</sup>; 5,93% untuk luas 36-44 m<sup>2</sup>; 6,91% untuk luas 45-54 m<sup>2</sup>; dan 70,63% untuk luas >54 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2018 kontribusi terendah masih terdapat pada Kota Magelang. Kota Magelang mengalami penurunan dari 2,7% pada tahun 2017 menjadi 2,5% pada tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar 0,2%. Penurunan dapat dilihat pada prosentase rumah tangga dalam luas lantai sebesar 10,33% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 14,63% untuk luas 21-35 m<sup>2</sup>; 6,30% untuk luas 36-44 m<sup>2</sup>; 8,62% untuk luas 45-54 m<sup>2</sup>; dan 60,12% untuk luas >54 m<sup>2</sup>.

**Tabel IV**  
**Kontribusi PBB P2 pada PAD tahun 2019**  
**KONTRIBUSI PBB P2 PADA PAD**  
**TAHUN 2019**  
**(dalam jutaan)**

<b>Kabupaten</b>	<b>Kontribusi</b>	<b>Keterangan</b>
Banjarnegara	8,9%	Sangat Berkontribusi
Banyumas	7,6%	Sangat Berkontribusi
Batang	11,4%	Sangat Berkontribusi
Blora	7,2%	Sangat Berkontribusi
Boyolali	10,2%	Sangat Berkontribusi
Brebes	9,7%	Sangat Berkontribusi
Cilacap	12,7%	Sangat Berkontribusi

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

		Berkontribusi
Demak	17,6%	Sangat Berkontribusi
Grobogan	8,8%	Sangat Berkontribusi
Jepara	9,0%	Sangat Berkontribusi
Karanganyar	6,9%	Sangat Berkontribusi
Kebumen	11,8%	Sangat Berkontribusi
Kendal	9,7%	Sangat Berkontribusi
Klaten	9,0%	Sangat Berkontribusi
Kudus	7,4%	Sangat Berkontribusi
Magelang	7,7%	Sangat Berkontribusi
Pati	5,6%	Sangat Berkontribusi
Pekalongan	5,3%	Sangat Berkontribusi
Pemalang	6,1%	Sangat Berkontribusi
Purbalingga	6,4%	Sangat Berkontribusi
Purworejo	10,0%	Sangat Berkontribusi
Rembang	5,1%	Sangat Berkontribusi
Semarang	10,8%	Sangat Berkontribusi
Sragen	7,1%	Sangat Berkontribusi
Sukoharjo	8,0%	Sangat Berkontribusi
Tegal	8,1%	Sangat Berkontribusi
Temanggung	4,9%	Sangat Berkontribusi
Wonogiri	8,0%	Sangat Berkontribusi
Wonosobo	8,1%	Sangat Berkontribusi
<b>Kota</b>		
Magelang	2,4%	Kurang Berkontribusi
Pekalongan	6,7%	Sangat Berkontribusi
Salatiga	4,0%	Sangat Berkontribusi
Semarang	23,2%	Sangat Berkontribusi
Surakarta	16,2%	Sangat Berkontribusi

		Sangat Berkontribusi
Tegal	5,0%	Sangat Berkontribusi

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)

Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir keseluruhan sangat berkontribusi. Hanya ada satu daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria kontribusi berbeda yaitu Kota Magelang dengan prosentase 2,4% atau kriteria cukup berkontribusi. Selain Kota Magelang seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memiliki kriteria sangat berkontribusi atau prosentase empat persen atau lebih. Prosentase tertinggi dimiliki Kota Semarang dengan prosentase 23,2%, Kabupaten Demak dengan prosentase 17,6%, dan Kota Surakarta dengan prosentase 16,2%.

Tahun 2019 masih sama seperti tahun 2017 dan 2018 dimana Kota Semarang menduduki urutan teratas dengan prosentase 23,2% naik 0,6% dari tahun 2018. Industri merupakan salah satu faktor pendorong yang besar sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat berkontribusi. Jumlah industri di Kota Semarang berjumlah 2.588. Dilihat dari prosentase rumah tangga dengan luas bangunan tempat tinggal Kota Semarang juga mengalami peningkatan. 11,09% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 5,15% untuk luas 21-35 m<sup>2</sup>; 2,85% untuk luas 36-44 m<sup>2</sup>; 6,61% untuk luas 45-54 m<sup>2</sup>; dan 74,3% untuk luas >54 m<sup>2</sup>.

Kabupaten/ Kota yang memiliki prosentase paling rendah terdapat pada Kota Magelang dengan besar prosentase kontribusi 2,4%. Kota Magelang merupakan Kabupaten/ Kota terkecil dengan luas 16,06 Km<sup>2</sup>. Di Kota Magelang terdapat 979 industri pada tahun 2019. Besar prosentase rumah tangga dengan luas lantai tempat tinggal Kota Magelang yaitu 7,30% untuk luas <21 m<sup>2</sup>; 10,36% untuk luas 21-35 m<sup>2</sup>; 7,69% untuk luas 36-44 m<sup>2</sup>; 7,68% untuk luas 45-54 m<sup>2</sup>; dan 66,97% untuk luas >54 m<sup>2</sup>.

**Tabel VI  
Kontribusi PBB P2 pada PAD tahun 2017-2019**

<b>KONTRIBUSI PBB P2 PADA PAD TAHUN 2017-2019</b>				
No	Kabupaten	2017	2018	2019
1	Banjarnegara	6,4%	9,5%	8,9%
2	Banyumas	8,0%	7,9%	7,6%
3	Batang	9,4%	8,9%	11,4%
4	Blora	6,2%	8,5%	7,2%
5	Boyolali	7,4%	11,7%	10,2%
6	Brebes	5,2%	9,4%	9,7%
7	Cilacap	8,3%	11,2%	12,7%
8	Demak	15,7%	15,6%	17,6%
9	Grobogan	5,9%	8,2%	8,8%
10	Jepara	6,7%	6,4%	9,0%
11	Karanganyar	6,2%	7,4%	6,9%
12	Kebumen	7,7%	12,0%	11,8%

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019**

13	Kendal	4,4%	6,3%	9,7%
14	Klaten	6,9%	6,8%	9,0%
15	Kudus	5,5%	7,1%	7,4%
16	Magelang	6,4%	7,9%	7,7%
17	Pati	4,4%	5,3%	5,6%
18	Pekalongan	3,9%	4,8%	5,3%
19	Pemalang	3,3%	5,5%	6,1%
20	Purbalingga	5,0%	6,7%	6,4%
21	Purworejo	7,5%	9,3%	10,0%
22	Rembang	3,7%	5,0%	5,1%
23	Semarang	9,9%	11,6%	10,8%
24	Sragen	4,6%	5,8%	7,1%
25	Sukoharjo	7,8%	8,3%	8,0%
26	Tegal	6,8%	6,8%	8,1%
27	Temanggung	4,2%	5,3%	4,9%
28	Wonogiri	4,3%	8,0%	8,0%
29	Wonosobo	8,1%	8,2%	8,1%

<b>Kota</b>				
30	Magelang	2,7%	2,5%	2,4%
31	Pekalongan	6,2%	7,2%	6,7%
32	Salatiga	3,5%	4,1%	4,0%
33	Semarang	19,4%	22,6%	23,2%
34	Surakarta	11,3%	15,5%	16,2%
35	Tegal	4,3%	4,8%	5,0%

Sumber: (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)

Dari tahun 2017, 2018 dan 2019 Kota Magelang memiliki kontribusi terendah dengan prosentase 2,7%, 2,5%. dan 2,4% atau masuk kriteria cukup berkontribusi, bahkan cenderung menampakkan penurunan dari tahun 2017, 2018, dan 2019 secara berturut-turut. Kemudian ada Kabupaten/ Kota yang memiliki kriteria berkontribusi atau prosentase 3-3,9%, yaitu Kabupaten Pekalongan dengan prosentase 3,9%, Kabupaten Rembang dengan 3,7%, Kota Salatiga 3,5%, dan Kabupaten Pemalang 3,3%, kesemuanya terdapat pada tahun 2017.

Pada Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan hingga memiliki prosentase lebih dari empat persen atau kriteria sangat berkontribusi ditahun 2018 dan terus naik di tahun 2019. Sedangkan pada Kota Salatiga pada tahun 2018 mengalami peningkatan kontribusi hingga 4,1% atau sangat berkontribusi, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,1% atau menjadi 4,0% tetapi masih termasuk dalam sangat berkontribusi.

Kabupaten/ Kota dengan Kontribusi tertinggi terdapat pada Kota Semarang dengan prosentase 19,4%, 22,6%, dan 23,2% dengan kriteria sangat berkontribusi.

Kemudian ada Kabupaten Demak dengan prosentase 15,7%, 15,6%, dan 17,6% dengan kriteria sangat berkontribusi. Serta Kota Surakarta dengan prosentase 11,3%, 15,5%, dan 16,2% dengan kriteria sangat berkontribusi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan yang diambil dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Ada 26 Kabupaten dan 4 kota yang memiliki kriteria kontribusi lebih dari empat persen atau kriteria sangat berkontribusi pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan kontribusi tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang. Berikut kesimpulan dari hasil perhitungan yang dilakukan:

- a. Pada tahun 2017 kontribusi tertinggi terdapat pada Kota Semarang dengan prosentase 19,4%, diikuti Kabupaten Demak dengan prosentase 15,7%, dan Kota Surakarta dengan prosentase 11,3%. Kontribusi terendah dimiliki Kota Magelang dengan prosentase 2,7%.
- b. Tahun 2018 kontribusi tertinggi masih dimiliki oleh Kota Semarang dengan prosentase 22,6% naik 3,2% dari tahun 2017. Kemudian Kabupaten Demak dengan prosentase 15,6% turun 0,1% dari tahun 2017. Urutan ketiga terdapat Kota Surakarta dengan prosentase 15,5% naik 4,2% dari tahun 2017. Kontribusi terendah dimiliki Kota Magelang dengan prosentase 2,5% atau turun 0,2% dari tahun 2017.
- c. Pada tahun 2019 Kota Semarang menjadi yang paling tinggi prosentase kontribusinya dengan 23,2% naik 0,6% dari tahun 2018. Kemudian Kabupaten Demak dengan prosentase 17,6% naik 2,1% dari tahun 2018. Setra urutan ketiga terdapat pada Kota Surakarta dengan prosentase 16,2% naik 0,7% dari tahun 2018. Kontribusi terendah terdapat pada Kota Magelang dengan prosentase 2,4% atau turun 0,1% dari tahun 2018.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara optimal guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti pada Kota Semarang kontribusi peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dapat dilakukan dengan meningkatkan industri yang merupakan salah satu faktor besar pendukung penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pada Kabupaten/ Kota yang memiliki kontribusi menurun seperti Kota Magelang dapat melakukan peningkatan dengan cara meningkatkan jumlah industri besar, selain itu peningkatan dengan memberikan keringanan-keringanan pembayaran pajak guna

# KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019

meningkatkan minat membayar pajak masyarakat, serta mempermudah akses-akses membayar pajak sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam membayar pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Harumdhani, N. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 Dan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Rahman Fatmawati. A. 2017. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makasar. *Jurnal Economix*. 5:104-115.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Suryani dan Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Edisi 2. Prenadamedia Group. Jakarta
- Susyanti, J dan A. Dahlan. 2015. *Perpajakan*. Empatdua Media. Malang
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Perpajakan*.
- Wibisono Taufik dan Yani Sri Mulyani. 2019. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomica*. 3(2): 133-140.
- Wardani Raudhatun dan Fadhlia Wida. 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *JIMEKA*. 2(3): 11.

<https://jateng.bps.go.id/>.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

<https://www.online-pajak.com/>.

<https://perkim.id/>.